



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, DAN
BPJS KETENAGAKERJAAN)**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Hari/Tanggal	: Rabu, 2 Maret 2016
Masa Persidangan	: III
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Rapat ke	: 33
Sifat Rapat	: Terbuka
Dengan	: 1. Direktur Utama BPJS Kesehatan. 2. Ketua dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Penyelesaian BPJS Kesehatan terkait defisit likuidasi sebesar Rp. 5,85 Trilyun pada tahun 2015. 2. Penjelasan mengenai perkembangan upaya BPJS Kesehatan dalam memberikan masukan terkait temuan dan permasalahan INA CBGs yang ditemukan di lapangan kepada National Casemix Center. 3. Penjelasan terkait perkembangan Coordination of Benefit (CoB) yang dilakukan antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta (jumlah asuransi swasta yang sudah melakukan CoB dengan BPJS Kesehatan, dan peserta yang sudah menggunakan fasilitas CoB) 4. Penjelasan BPJS Kesehatan terkait upaya untuk mengatasi Moral Hazard Peserta Mandiri dalam kepatuhan membayar iuran.
Ketua Rapat	: H. Syamsul Bachri S, M.Sc/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gd. Nusantara I DPR/MPR RI Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta

Hadir : Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta
: A. 23 orang dari 49 Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Dirut BPJS Kesehatan beserta jajaran;
C. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan serta Ketua dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dibuka pukul 10.45 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Kesehatan bersama dengan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk membuat kajian terkait:
 - a. Opsi Penyesuaian Besaran Iuran, Suntikan Dana Tambahan dari Pemerintah, dan Penyesuaian Manfaat sebagai solusi atas kemungkinan terjadinya *mismatch* iuran dan Pengeluaran di tahun 2016.
 - b. Pelaksanaan kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan sistem pembayaran klaim dengan metode INA CBG's di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut.
2. Komisi IX DPR RI meminta agar BPJS Kesehatan, sebagai salah satu anggota Tim Penyusunan Tarif, untuk mempercepat analisa data biaya pelayanan kesehatan sehingga dapat menjadi solusi bagi permasalahan di lapangan.
3. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan untuk mendorong implementasi *Coordination of Benefit* (COB) sebagai salah satu upaya untuk peningkatan jumlah Peserta Penerima Upah (PPU).
4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk mengatasi permasalahan peserta kelas III mandiri yang memenuhi kriteria tidak mampu untuk dialihkan menjadi peserta PBI daerah yang merupakan bagian yang integral dalam program JKN selambat-lambatnya akhir tahun 2016.
5. Komisi IX DPR RI meminta kepada BPJS Kesehatan untuk melibatkan Anggota Komisi IX DPR RI dalam upaya melakukan terobosan peningkatan kepatuhan peserta mandiri, termasuk memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pentingnya kolektifitas iuran peserta BPJS Kesehatan kepada masyarakat.

6. Komisi IX DPR RI meminta kepada BPJS Kesehatan untuk memberikan jawaban secara tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI pada RDP hari ini tanggal 2 Maret 2016 dan diserahkan ke Sekretariat Komisi IX DPR RI paling lambat tanggal 7 Maret 2016.

Rapat diakhiri pukul 14.15 WIB

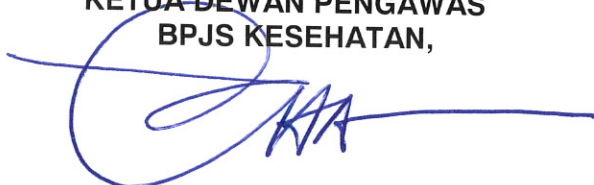
**KETUA RAPAT
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,**



H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc

A-312

**KETUA DEWAN PENGAWAS
BPJS KESEHATAN,**



CHAIRUL RADJAB NASUTION

DIRUT BPJS KESEHATAN,



Dr.dr. FACHMI IDRIS, M.Kes